

Kolaborasi *Opinion Leader* dalam Pengelolaan Masalah Sampah di Kota Banjarmasin

^{1**}Sarwani, ²Bachruddin Ali Akhmad, ³Sri Astuty, ⁴Muhammad Ainani, ⁵Nur Tazkia
Amalia Hamdie

^{1,2,3,4,5}Universitas Lambung Mangkurat

E-mail: sarwani_komunikasi@ulm.ac.id

Diserahkan: 25 Februari 2026

Direvisi: 3 Maret 2026

Diterima: 11 Maret 2026

Abstrak

Penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Basirih memunculkan tantangan serius pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin dan menuntut kolaborasi multi aktor. Penelitian ini bertujuan mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis kolaborasi opinion leader dalam pengelolaan sampah pascapenutupan TPA. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan Focus Group Discussion, wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Verifikasi dan triangulasi data dilakukan antar teknik, analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil menunjukkan kolaborasi opinion leader berperan strategis sebagai katalisator dalam memediasi kebijakan dan mendorong partisipasi publik. Peran ini terwujud melalui pembangunan kredibilitas yang kuat, kolaborasi multi aktor, strategi komunikasi tatap muka dan digital yang efektif, serta implementasi kebijakan partisipatif yang didukung insentif ekonomi. Kolaborasi terbukti mampu mengatasi krisis sampah secara berkelanjutan, meskipun tantangan struktural dan budaya masih menjadi kendala. Temuan ini menegaskan bahwa opinion leader merupakan aset vital dalam menormalisasi praktik pengelolaan sampah dan dapat menjadi model rujukan bagi kota lain.

Kata Kunci: Bank sampah, kolaborasi, opinion leader, pengelolaan sampah, TPS 3R

Abstract

The closure of the Basirih Final Disposal Site (TPA) presents serious challenges for waste management in Banjarmasin City and demands multi-actor collaboration. This study aims to identify, describe, and analyze opinion leader collaboration in post-TPA closure waste management. The study employed a qualitative approach, with data collection techniques including focus group discussions, in-depth interviews, observation, and documentation. Data verification and triangulation were conducted across techniques, and data analysis employed the Miles and Huberman interactive model. The results demonstrate that opinion leader collaboration plays a strategic role as a catalyst in mediating policy and encouraging public participation. This role is realized through building strong credibility, multi-actor collaboration, effective face-to-face and digital communication strategies, and the implementation of participatory policies supported by economic incentives. Collaboration has proven capable of addressing the waste crisis sustainably, although structural and cultural challenges remain. These findings confirm that opinion leaders are a vital asset in normalizing waste management practices and can serve as a reference model for other cities.

Keywords: Collaboration, opinion leader, TPS 3R, waste management, waste bank

PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah di Indonesia telah menjadi salah satu isu lingkungan yang sangat mendesak akibat pertumbuhan populasi yang pesat, akselerasi urbanisasi, dan pergeseran pola konsumsi masyarakat yang cenderung boros dan berorientasi pada produk sekali pakai telah menciptakan volume sampah yang tidak sebanding dengan kapasitas pengelolaan yang tersedia. Krisis ini tidak hanya terbatas pada masalah teknis pembuangan, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang saling terkait. Indonesia termasuk negara dengan produksi sampah terbesar di dunia, terutama sampah plastik yang menjadi komponen signifikan dalam tumpukan limbah perkotaan dan pencemaran lingkungan, bahkan Indonesia menempati posisi kedua setelah Cina sebagai penyumbang pencemaran sampah plastik di lautan global (Jambeck et al., 2015; Lebreton & Andrady, 2019). Kondisi ini disebut sebagai “darurat sampah plastik” yang mengancam ekosistem laut dan kehidupan manusia melalui kontaminasi rantai makanan (Astuti & Rokhmayanti, 2019).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mendefinisikan sampah sebagai sisa kegiatan manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat baik organik maupun anorganik yang sudah tidak berguna dan dibuang ke lingkungan (Republik Indonesia, 2008). Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), produksi sampah harian nasional dapat mencapai angka 175 ribu ton, dengan mayoritas berasal dari sampah domestik atau sampah rumah tangga. Angka ini terus meningkat, khususnya di kota-kota besar yang mengalami densitas penduduk dan aktivitas ekonomi tinggi. Akibatnya, sistem pengelolaan sampah yang ada, yang sebagian besar masih mengandalkan model linier "kumpul-angkut-buang," menjadi tidak efektif dan kewalahan (Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021; Juniartini, 2020).

Selain ancaman ekologis, pengelolaan sampah yang tidak memadai juga menimbulkan dampak kesehatan masyarakat yang serius. Tumpukan sampah terbuka menjadi sarang penyakit, memfasilitasi perkembangbiakan vektor penyakit seperti nyamuk dan tikus. Dekomposisi sampah organik yang tidak dikelola dengan baik melepaskan gas metana, sebuah gas rumah kaca yang 25 kali lebih kuat daripada karbon dioksida dalam memerangkap panas atmosfer, sehingga memperburuk krisis iklim global. Faktor-faktor penghambat seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya kesadaran publik, dan lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi kendala krusial dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah terpadu yang berkelanjutan. Hendra (2016) dan Lingga et al., (2024) mengidentifikasi

bahwa resistensi masyarakat terhadap perubahan perilaku dan minimnya implementasi kebijakan yang efektif merupakan tantangan utama.

Pengelolaan sampah merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, perusahaan, dan individu. Tujuan utama dari pengelolaan sampah adalah untuk mengurangi volume sampah yang dihasilkan, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali bahan jika memungkinkan, serta membuang limbah secara aman jika tidak dapat didaur ulang atau digunakan kembali (Elamin et al., 2018). Proses ini harus dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu mulai dari sumber sampah hingga pada tahap pengolahan akhir. Saat ini, pengelolaan sampah telah menjadi masalah nasional yang mendesak, sehingga langkah-langkah yang efektif dan berkesinambungan perlu diimplementasikan dari awal hingga akhir proses pengelolaan sampah. Hal ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari pembuangan sampah terhadap lingkungan hidup. Dampak negatif dari pengelolaan sampah yang tidak baik dapat memiliki konsekuensi yang fatal terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan ekonomi, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (Triani & Amberi, 2023).

Studi kasus di Kota Banjarmasin mengilustrasikan secara konkret kompleksitas permasalahan ini. Penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Basirih, yang selama ini menjadi pusat pembuangan sampah utama, telah memicu krisis pengelolaan sampah yang memaksa kota mencari solusi yang lebih radikal dan inovatif. Volume sampah harian Banjarmasin yang mencapai sekitar 600 ton, dengan dominasi sampah organik sebesar 55,89% menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN, 2024), menuntut adanya mekanisme pengelolaan yang efisien dan berbasis partisipasi. Keterbatasan kapasitas Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang ada dan kesulitan dalam mendapatkan lahan baru akibat penolakan masyarakat telah menimbulkan fenomena pembuangan sampah liar yang semakin memperburuk situasi lingkungan, seperti yang dikonfirmasi dalam wawancara dengan Nanik (Hasil wawancara Fatmawati, 2025; Nanik, 2025).

Hasil observasi menunjukkan bahwa distribusi fasilitas Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Kota Banjarmasin masih mengalami ketimpangan geografis, di mana satu unit TPS melayani beberapa kelurahan sekaligus, sehingga mengakibatkan kelebihan kapasitas dan berpotensi mendorong praktik pembuangan sampah sembarangan. Permasalahan ini diperparah oleh hambatan dalam pengembangan TPS baru, meliputi keterbatasan lahan, keterbatasan anggaran untuk akuisisi lahan, proses birokrasi yang panjang, serta resistensi masyarakat yang berujung pada penutupan fasilitas akibat pencemaran

lingkungan. Kompleksitas pengelolaan sampah tidak hanya terbatas pada peningkatan volume sampah, tetapi juga mencakup dampak serius terhadap degradasi lingkungan dan kesehatan masyarakat, termasuk pencemaran air dan tanah, serta kerentanan sosial-ekonomi pekerja informal, seperti pemulung. Mengingat kompleksitas permasalahan tersebut dan keterbatasan teknologi pengelolaan sampah yang tersedia, diperlukan peran strategis *opinion leader* dalam tahapan perencanaan, pengelolaan, dan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin.

Menghadapi tantangan multidimensi ini, dibutuhkan pergeseran paradigma dari pendekatan *technocentric* ke pendekatan yang lebih holistik dan sosiokultural. Solusi yang berkelanjutan tidak hanya terletak pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga pada pembentukan norma sosial dan perubahan perilaku kolektif. Dalam konteks ini, *opinion leader* muncul sebagai agen perubahan yang potensial dan strategis. Teori komunikasi aliran dua tahap, yang dikembangkan oleh Katz dan Lazarsfeld (2017), menyediakan kerangka teoretis yang kuat untuk memahami peran mereka. Teori ini berargumen bahwa pengaruh media massa sering kali tidak langsung, melainkan difasilitasi oleh individu-individu yang memiliki pengaruh, yaitu *opinion leader*, yang menyaring dan menerjemahkan informasi sebelum menyebarkannya kepada anggota komunitas lainnya. Dengan demikian, *opinion leader* dapat bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan kebijakan dan program pemerintah dengan pemahaman dan partisipasi masyarakat.

Relevansi peran *opinion leader* juga diperkuat oleh teori difusi inovasi milik Rogers, Singhal, dan Quinlan (2019). Teori ini menjelaskan bahwa adopsi inovasi, termasuk praktik pengelolaan sampah yang lebih baik seperti pemilahan sampah di sumber, sangat bergantung pada pengaruh dari para inovator dan *opinion leader* dalam sebuah sistem sosial. Mereka adalah figur yang dipercaya dan dihormati, yang mampu mengurangi ketidakpastian seputar praktik baru dan mendorong anggota komunitas lainnya untuk mengadopsi perilaku tersebut. Dengan menjadi contoh nyata dan juru bicara yang kredibel, *opinion leader* dapat mempercepat proses adopsi dan internalisasi nilai-nilai ramah lingkungan.

Pada tingkat yang lebih luas, penyelesaian masalah sampah membutuhkan kolaborasi yang efektif antar berbagai pemangku kepentingan. Teori tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) yang diusung oleh (Ansell dan Gash, 2008) menekankan bahwa masalah sosial yang kompleks tidak dapat diselesaikan oleh satu aktor tunggal. Sebaliknya, hal ini memerlukan sinergi dan dialog konstruktif antara pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan komunitas lokal. Dalam konteks Banjarmasin, kolaborasi ini terwujud melalui kerja sama

antara pemerintah daerah, komunitas lokal yang digerakkan oleh *opinion leader*, serta para pelaku usaha. *Opinion leader* berperan sentral dalam memfasilitasi dialog, membangun kepercayaan, dan mengkoordinasikan berbagai upaya, mengubah resistensi dan apati menjadi partisipasi yang aktif, seperti yang juga diilustrasikan oleh (Wilson, Velis, & Cheeseman, 2006) dalam konteks peran sektor informal dalam pengelolaan sampah.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan program pengelolaan sampah, seperti bank sampah dan TPS 3R, lebih optimal apabila dilengkapi dengan strategi komunikasi yang mengkombinasikan edukasi tatap muka dan kampanye digital melalui media sosial guna menjangkau berbagai segmen masyarakat (Aromi, Putri, & Rahayu, 2024; Putri, Amelia, & Shabira, 2025; Rahayu & Evanita, 2024). Melalui *opinion leader*, norma sosial dapat terbentuk dan praktik ramah lingkungan dapat diadopsi secara lebih masif (Cialdini, Kallgren, & Raymond R. Reno, 1991).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menjawab tiga pertanyaan utama: pertama, bagaimana membangun kredibilitas sebagai *opinion leader* di Kota Banjarmasin; kedua, bagaimana bentuk kolaborasi ideal multi aktor sebagai *opinion leader*; dan ketiga, bagaimana memanfaatkan momentum dan ruang publik lokal dalam kampanye pengelolaan sampah.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mengkaji secara mendalam peran *opinion leader* dalam pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin pascapenutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Basirih. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada kebutuhan untuk memahami dinamika sosial, proses interaksi, dan makna yang dibangun oleh para aktor dalam konteks lokal. Studi kasus dipandang sebagai metode yang tepat karena memungkinkan eksplorasi intensif terhadap fenomena kompleks dalam *setting* alaminya, sesuai dengan saran Yin (2018) bahwa studi kasus sangat efektif untuk menjawab pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa” dalam konteks kebijakan publik dan tata kelola sosial.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui empat metode utama: (1) *Focus Group Discussion* (FGD) dengan *opinion leader* dan pemangku kepentingan kunci, termasuk perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, pengelola Bank Sampah TPS 3R, Muslimat NU Kalimantan Selatan, dan WALHI; (2) wawancara mendalam dengan narasumber strategis untuk mendapatkan perspektif individual yang lebih personal dan reflektif; (3)

observasi lapangan terhadap praktik pengelolaan sampah, seperti aktivitas di bank sampah, pelaksanaan program *Surung Sintak*, dan interaksi sosial dalam forum komunitas; serta (4) dokumentasi terhadap kebijakan daerah, laporan DLH, data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), dan konten media sosial terkait kampanye lingkungan. FGD dilaksanakan secara terpisah untuk setiap kelompok agar tidak terjadi dominasi suara, dengan panduan fokus yang telah divalidasi oleh tim peneliti.

Verifikasi data dilakukan melalui triangulasi antar teknik (*data triangulation*) dan antar sumber (*source triangulation*) untuk meningkatkan kredibilitas temuan. Misalnya, informasi tentang efektivitas insentif ekonomi dari wawancara diperkuat dengan observasi langsung di bank sampah dan data dokumenter dari SIPSN. Analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data (dalam bentuk narasi, tabel, dan matriks), serta penarikan kesimpulan yang dikonfirmasi melalui cek keanggotaan (*member checking*) kepada beberapa narasumber kunci (Miles et al., 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Basirih pada tahun 2025 menjadi titik balik kritis dalam tata kelola sampah di Kota Banjarmasin. Krisis yang muncul bukan sekadar persoalan teknis pengangkutan dan pembuangan, melainkan mengungkap rapuhnya sistem pengelolaan sampah yang selama ini bergantung pada model linear “kumpul-angkut-buang”. Dalam kondisi tersebut, muncul kebutuhan mendesak akan pendekatan baru yang tidak hanya mengandalkan kapasitas infrastruktur, tetapi juga membangun partisipasi kolektif dari masyarakat. Di sinilah peran *opinion leader* menonjol sebagai aktor sentral yang mampu menjembatani kebijakan pemerintah dengan realitas sosial di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *opinion leader*—dalam bentuk tokoh agama, aktivis lingkungan, pengelola bank sampah, hingga aparatur pemerintahan lokal—berperan strategis sebagai katalisator perubahan, bukan hanya dalam menyosialisasikan program, tetapi lebih jauh dalam membentuk norma sosial, memfasilitasi kolaborasi lintas sektor, dan mengakselerasi adopsi perilaku ramah lingkungan.

Peran strategis *opinion leader* dalam pengelolaan sampah di Banjarmasin dapat dianalisis melalui empat dimensi utama: (1) pembangunan kredibilitas yang kokoh, (2) kolaborasi multi aktor yang inklusif, (3) strategi komunikasi dua arah yang adaptif, dan (4) implementasi kebijakan partisipatif berbasis insentif. Keempat pilar ini saling terhubung dan

membentuk ekosistem tata kelola sampah yang berkelanjutan secara sosial, meskipun masih menghadapi tantangan struktural dan budaya yang signifikan.

Pilar pertama adalah pembangunan kredibilitas sebagai fondasi pengaruh sosial. Kredibilitas merupakan fondasi utama dari otoritas seorang *opinion leader*. Tanpa kepercayaan dari komunitas, pesan apa pun—sebaik apa pun—akan sulit diterima. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kredibilitas *opinion leader* di Banjarmasin tidak dibangun melalui jabatan formal atau gelar, melainkan melalui aksi nyata, konsistensi, dan kedekatan personal dengan masyarakat. Salah satu contoh paling kuat adalah peran WALHI Kalimantan Selatan dalam mendampingi Forum Pedagang Kaki Lima (PKL) Lapangan Murjani. Sejak awal krisis Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Basirih, pedagang di sana mengalami kesulitan besar dalam mengelola limbah dapur, karena tidak ada armada pengangkutan yang datang secara rutin. WALHI hadir bukan hanya sebagai lembaga advokasi, tetapi langsung turun tangan membantu mengorganisir pemilahan, menyediakan wadah, bahkan ikut serta dalam penjemputan sampah bersama petugas gerobak.

Di sisi lain, Muslimat NU menunjukkan model kredibilitas yang berbeda namun sama efektifnya. Sebagai organisasi perempuan yang memiliki basis massa kuat di tingkat RT/RW, mereka memanfaatkan otoritas moral dan spiritual para pengurus dan ulama. Salah satu narasumber dari Muslimat NU menyatakan, *“Kami tidak bicara sampah langsung. Kami mulai dari nilai-nilai agama. ‘Kebersihan sebagian dari iman,’ itu kalimat yang sudah dikenal semua orang. Dari situ, kami sambungkan ke praktik pilah sampah, bank sampah, dan daur ulang”* (Hasil FGD, 2025), Seperti dalam gambar di bawah ini :



Gambar 1. Kegiatan FGD Bersama Narasumber Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Banjarmasin
Sumber: Dokumentasi Penulis 2025

Pendekatan ini sangat efektif karena menyentuh ranah identitas dan keyakinan masyarakat, sehingga pesan lingkungan tidak terasa asing atau dipaksakan.

Yang menarik, kredibilitas juga dibangun melalui transparansi ekonomi. Banyak masyarakat awalnya skeptis terhadap bank sampah karena meragukan apakah sampah benar-benar bernilai uang. Namun, ketika *opinion leader* seperti Fatmawati dari Bank Sampah TPS 3R Banjarmasin secara konsisten menunjukkan buku tabungan nasabah, memberikan laporan penimbangan harian, dan menukarkan sampah dengan paket sembako atau uang tunai, kepercayaan pun terbangun. Beberapa nasabah bahkan bisa mengumpulkan hingga jutaan rupiah dalam sebulan dari hasil tabungan sampah, sebuah angka yang cukup signifikan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Kisah-kisah seperti ini menjadi alat persuasi yang sangat kuat, karena bukan lagi soal idealisme lingkungan, tetapi manfaat nyata yang bisa dirasakan langsung.

Temuan ini selaras dengan teori difusi inovasi Rogers et al. (2019), yang menekankan bahwa adopsi suatu praktik baru sangat dipengaruhi oleh figur yang dipercaya. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa kredibilitas tidak statis; ia harus terus dipertahankan melalui konsistensi aksi dan respons terhadap dinamika lapangan. Ketika salah satu bank sampah sempat tertunda pembayaran karena masalah logistik, kepercayaan masyarakat langsung menurun, dan butuh waktu beberapa minggu untuk memulihkannya. Ini menunjukkan bahwa kredibilitas adalah aset yang rentan, dan *opinion leader* harus selalu siap menjaganya.

Pilar kedua yaitu, kolaborasi multi aktor. Pengelolaan sampah adalah isu yang secara intrinsik melibatkan banyak aktor: pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat sipil, akademisi, dan komunitas lokal. Namun, selama ini koordinasi antaraktor seringkali lemah, fragmentaris, dan reaktif. Penelitian ini menemukan bahwa *opinion leader* berhasil memainkan peran sebagai *focal point* atau poros kolaborasi, yang mampu menyatukan berbagai kepentingan menjadi satu gerakan yang terkoordinasi.

Salah satu bentuk kolaborasi yang paling inovatif adalah kerja sama antara WALHI, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarmasin, dan DLH Kota Banjarbaru. Meski berada di wilayah administrasi berbeda, kedua kota ini saling terkait secara geografis dan ekologis. Ketika TPA Basirih ditutup, banyak sampah dari Banjarmasin dialihkan ke Banjarbaru, yang kemudian mengalami beban berlebih. Alih-alih saling menyalahkan, *opinion leader* dari WALHI memfasilitasi pertemuan lintas daerah untuk mencari solusi bersama. Hasilnya, dikembangkan mekanisme pengangkutan bersama antara PKL Lapangan Murjani

(Banjarmasin) dengan fasilitas pengolahan di Banjarbaru. Model ini tidak hanya mengatasi masalah teknis, tetapi juga membangun solidaritas antarkomunitas yang sebelumnya terpisah secara birokratis.

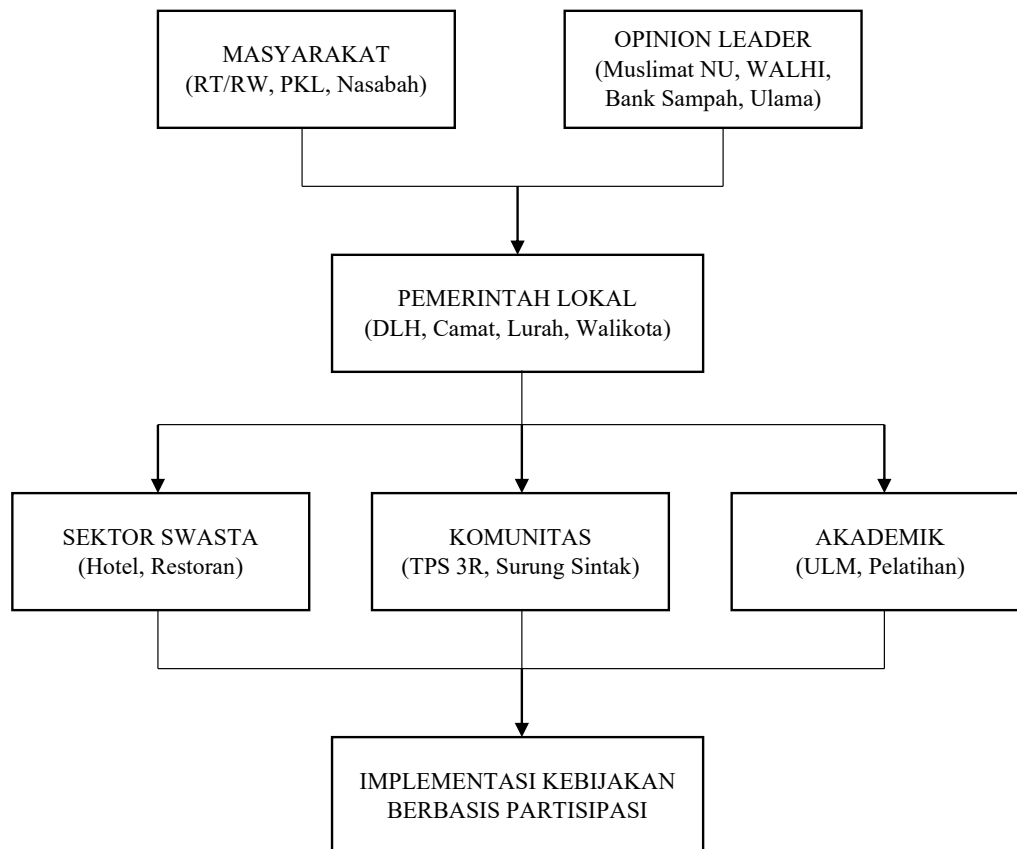
Di level mikro, kolaborasi juga terjadi di tingkat RT/RW. Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, misalnya, tidak lagi hanya mengeluarkan kebijakan dari atas, tetapi aktif terlibat dalam pertemuan-pertemuan rutin RT bersama *opinion leader* lokal. Mereka memberikan edukasi, membagikan alat pemilahan, dan mendorong pembentukan bank sampah berbasis lingkungan. Peran camat, lurah, hingga ketua RT menjadi penting karena mereka adalah aktor yang paling dekat dengan masyarakat. Seperti disampaikan oleh Dwi Naniek Muhariyani dari DLH, “*Kami sadar bahwa kebijakan tidak akan jalan jika tidak ada dukungan di lapangan. Maka kami libatkan semua pihak, dari atas sampai bawah, agar ada rasa kepemilikan*” (Hasil FGD, 2025).

Kolaborasi juga melibatkan sektor swasta. Beberapa hotel besar di Banjarmasin, seperti Hotel Zuri dan Swiss-Belhotel, telah menjalin kerja sama dengan bank sampah untuk mengelola sampah dapur dan plastik sekali pakai. Bahkan, DLH sedang merancang program kerja sama dengan perusahaan energi untuk mengolah sampah organik menjadi biomassa. Selain itu, pendekatan kepada nelayan dan pelaku usaha maritim juga dilakukan untuk mengelola sampah kapal, yang selama ini menjadi sumber polusi Sungai Martapura.

Namun, kolaborasi ini tidak selalu berjalan mulus. Beberapa narasumber mengakui adanya ego sektoral antarinstansi, keterbatasan anggaran, dan proses birokrasi yang panjang. Misalnya, rencana pembangunan TPS 3R baru sering tertunda karena masalah izin lahan dan penolakan masyarakat sekitar. Di sinilah peran *opinion leader* menjadi krusial, mereka bertindak sebagai mediator yang mampu membuka dialog, meredam konflik, dan membangun kepercayaan antarpihak. Tanpa kehadiran mereka, kolaborasi lintas sektor akan sangat sulit terwujud.

Temuan ini mendukung teori *collaborative governance* (Ansell & Gash, 2008), yang menekankan bahwa penyelesaian masalah kompleks memerlukan kemitraan antara negara, pasar, dan masyarakat sipil. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa kolaborasi tidak bisa dipaksakan dari atas; ia harus tumbuh dari bawah melalui inisiatif lokal dan kepemimpinan yang inklusif.

Model kolaborasi ini dapat digambarkan melalui Diagram Alir Kolaborasi *Opinion Leader* dalam Tata Kelola Sampah:



Gambar 2. Diagram Alir Kolaborasi *Opinion Leader* dalam Tata Kelola Sampah di Banjarmasin

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2025

Pilar ketiga yaitu strategi komunikasi hibrida. Komunikasi merupakan alat utama *opinion leader* dalam mengubah persepsi dan perilaku masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang paling efektif di Banjarmasin adalah pendekatan hibrida: kombinasi antara komunikasi tatap muka yang personal dan pemanfaatan media digital untuk perluasan jangkauan.

Komunikasi tatap muka tetap menjadi tulang punggung dalam upaya edukasi. *Opinion leader* secara rutin hadir dalam forum-forum yang sudah mapan di masyarakat, seperti pertemuan yasinan, arisan PKK, rapat RT, dan pengajian. Di forum-forum ini, pesan tentang pengelolaan sampah disampaikan secara halus, tidak menggurui, dan disesuaikan dengan konteks sosial. Misalnya, dalam pengajian, pesan kebersihan dikaitkan dengan ajaran agama; dalam arisan PKK, dibahas manfaat ekonomi dari bank sampah. Pendekatan ini sangat efektif karena tidak mengganggu ritme sosial masyarakat, melainkan memanfaatkannya sebagai sarana edukasi.

Selain itu, kehadiran fisik *opinion leader* memungkinkan terjadinya interaksi dua arah. Masyarakat bisa langsung mengajukan pertanyaan, menyampaikan keluhan, atau memberikan masukan. Ketika ada protes terhadap penempatan TPS, *opinion leader* tidak langsung membantah, tetapi mendengarkan, mengumpulkan data, dan kemudian menyampaikan argumen dengan data yang jelas. Seperti disampaikan oleh salah satu tokoh Muslimat NU, “Kalau kita datang dengan data, orang akan lebih percaya. Kami catat semua keluhan, lalu kami bawa ke DLH. Baru setelah ada solusi, kami kembali ke masyarakat” (Hasil wawancara, 2025).

Di sisi lain, media sosial terutama Instagram dimanfaatkan sebagai alat pelengkap untuk menjangkau generasi muda dan memperluas *exposure* program. Bank Sampah TPS 3R, misalnya, aktif memposting konten edukatif, testimoni nasabah, dan informasi jadwal penjemputan. Mereka juga membuat kampanye menarik seperti “Muslimat Darling” (Muslimat Sadar Lingkungan), yang menggabungkan konten lingkungan dengan kompetisi daur ulang. Konten-konten seperti ini tidak hanya informatif, tetapi juga menyenangkan dan mudah dibagikan, sehingga meningkatkan viralitas pesan.

DLH Kalimantan Selatan juga menggunakan Instagram (@dlhkalselprov) untuk mempromosikan program “Pilah Sampah dapat Sembako”, yang menunjukkan proses pemilahan, penimbangan, hingga penukaran sampah dengan paket sembako. Gambar-gambar dan video pendek yang ditampilkan memberikan bukti visual bahwa program ini benar-benar berjalan, sehingga mengurangi skeptisisme masyarakat.



Gambar 3. Konten Kegiatan Pemilahan Sampah DLH Kalimantan Selatan

Sumber: Instagram @dlhkalselprov

Pendekatan hibrida ini sangat relevan dengan temuan Aromi et al. (2024) dan Putri et al. (2025) yang menekankan pentingnya strategi komunikasi ganda. Namun, penelitian ini menambahkan bahwa efektivitas media digital sangat tergantung pada keberadaan komunikasi tatap muka yang kuat di belakangnya. Tanpa basis kepercayaan yang dibangun secara langsung, konten digital bisa dianggap sebagai “pencitraan” belaka.

Pilar keempat yaitu insentif ekonomi dan internalisasi norma sosial. Salah satu faktor pendorong utama perubahan perilaku adalah insentif ekonomi. Hampir semua narasumber sepakat bahwa narasi “*sampah itu uang*” menjadi salah satu alasan utama masyarakat mau terlibat dalam program pengelolaan sampah. Program bank sampah, TPS 3R, dan *surung sintak* (gerobak pengangkut sampah harian) berhasil karena memberikan manfaat langsung berupa uang tunai, sembako, atau potongan tagihan.

Namun, yang lebih menarik adalah bagaimana insentif ini perlahan-lahan mengarah pada internalisasi norma sosial. Awalnya, masyarakat berpartisipasi karena ingin dapat uang, tetapi lama-kelamaan mereka mulai merasa malu jika membuang sampah sembarangan. Di beberapa RT, warga yang tidak memilah sampah mulai dikritik oleh tetangganya sendiri. Bahkan, ada inisiatif swadaya seperti larangan penggunaan kantong kresek dan kewajiban menanam bunga di pekarangan rumah, yang diterapkan tanpa paksaan dari pemerintah. Ini menunjukkan bahwa perubahan perilaku tidak hanya didorong oleh insentif eksternal, tetapi juga oleh tekanan sosial dan identitas kolektif.

Namun, tantangan tetap ada. Beberapa komunitas, terutama di kawasan padat penduduk, masih mengalami kesulitan karena keterbatasan lahan dan infrastruktur. Selain itu, ada resistensi budaya terhadap perubahan, terutama dari generasi tua yang merasa “sudah biasa buang sampah di sungai”. Upaya edukasi harus terus dilakukan, dan insentif harus dipertahankan agar tidak terjadi *relapse*.

Secara keseluruhan, kolaborasi *opinion leader* di Banjarmasin menunjukkan model tata kelola sampah yang partisipatif, inklusif, dan berbasis komunitas. Mereka berhasil mengisi kekosongan kepemimpinan yang sering terjadi dalam kebijakan publik, sekaligus menjadi jembatan antara negara dan masyarakat. Namun, keberhasilan ini tidak boleh mengaburkan kenyataan bahwa sistem ini masih rapuh dan sangat bergantung pada individu-individu tertentu. Jika salah satu *opinion leader* mundur atau kehilangan kredibilitas, maka jaringan kolaborasi bisa runtuh.

Selain itu, tantangan struktural—seperti kurangnya TPS, minimnya anggaran, dan birokrasi yang lambat—masih menjadi hambatan besar. *Opinion leader* bisa mendorong

partisipasi, tetapi mereka tidak bisa membangun infrastruktur. Oleh karena itu, perlu ada komitmen politik yang kuat dari pemerintah untuk mendukung secara kelembagaan dan anggaran.

Penelitian ini juga mengidentifikasi perlunya penguatan kapasitas bagi *opinion leader*, terutama dalam hal manajemen program, pelaporan, dan advokasi kebijakan. Selama ini, banyak dari mereka bekerja secara sukarela tanpa pelatihan formal. Padahal, peran mereka semakin kompleks dan menuntut keterampilan manajerial yang baik.

Temuan penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi ilmu komunikasi dan kebijakan lingkungan. Pertama, penelitian ini memperkaya teori *two-step flow* Katz & Lazarsfeld (2017) dengan menunjukkan bahwa *opinion leader* bukan hanya penyampai informasi, tetapi juga agen perubahan sosial yang aktif membangun norma, memfasilitasi kolaborasi, dan menciptakan inovasi lokal. Kedua, penelitian ini mendukung teori difusi inovasi dengan menunjukkan bahwa adopsi perilaku lingkungan sangat dipengaruhi oleh figur yang dipercaya, terutama dalam konteks masyarakat yang kuat ikatan sosial dan keagamaannya.

Secara praktis, temuan ini menyarankan agar pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga menginvestasikan sumber daya pada penguatan peran *opinion leader* melalui pelatihan, pendampingan, dan integrasi dalam struktur kebijakan. Model Banjarmasin bisa direplikasi di kota-kota lain yang menghadapi tantangan serupa, asalkan disesuaikan dengan konteks lokal.

SIMPULAN

Peran *opinion leader* pada pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin krusial sebagai katalisator dalam pengelolaan sampah, yang memediasi partisipasi publik dan kebijakan pemerintah. Hal ini didasarkan pada strategi yang sistematis, mencakup pembangunan kredibilitas melalui rekam jejak aksi nyata dan kepemimpinan yang terpercaya, serta kolaborasi lintas sektor. Kelebihan dari model ini adalah kemampuan dalam mengintegrasikan berbagai pemangku kepentingan, dari pemerintah hingga komunitas swadaya, serta penerapan strategi komunikasi yang efektif yang disesuaikan dengan sasaran, dan insentif yang terbukti mampu mengubah perilaku masyarakat. Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi kekurangan dan tantangan, yaitu hambatan struktural seperti keterbatasan infrastruktur dan resistensi budaya yang masih sulit diatasi. Berdasarkan temuan ini, penelitian selanjutnya dapat berfokus pada pengembangan model pengelolaan sampah yang lebih adaptif

terhadap tantangan budaya dan inovasi infrastruktur yang berkelanjutan. Kontribusi penelitian ini adalah penegasan bahwa *opinion leader* merupakan aset vital dalam menormalisasi praktik pengelolaan sampah di tingkat akar rumput dan dapat menjadi model rujukan bagi penelitian serupa di wilayah urban lain, khususnya yang menghadapi tantangan serupa.

ACKNOWLEDGMENT

Penelitian ini dapat terwujud berkat dukungan dan kolaborasi yang signifikan dari berbagai pihak. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dwi Naniek Muhariyani dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin atas arahan dan dukungan yang berharga. Apresiasi juga kami sampaikan kepada Mas Raden Rafiq Sepdian Fadel Wibisono dari WALHI yang telah memberikan wawasan mendalam, serta Ibu Hj. Mariatul Norhidayati dari Muslimat NU atas kerja sama yang terjalin dengan baik. Dukungan praktis dari Ibu Fatmawati dari Bank Sampah TPS 3R Banjarmasin turut menjadi kunci dalam keberhasilan penelitian ini. Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh Tim Peneliti atas dedikasi dan kontribusinya yang tak ternilai dalam setiap tahapan proses ini. Dukungan kolektif ini merupakan fondasi utama yang memungkinkan penelitian ini selesai dengan baik.

REFERENSI

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Aromi, Z., Putri, O. A., & Rahayu, R. (2024). Pengelolaan Sampah Plastik di Kota-kota Indonesia: Tantangan Lokal dan Pendekatan Partisipatif untuk Solusi Berkelanjutan Bagi Masyarakat. *Jurnal Ekologi, Masyarakat Dan Sains*, 5(2), 251–255. <https://doi.org/https://doi.org/10.55448/5f7d0846>
- Astuti, F. D., & Rokhmayanti. (2019). Pengelolaan sampah sebagai pencegahan penyakit tular vektor. *Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan*. Universitas Ahmad Dahlan. Retrieved from <http://www.depkes.go.id/article/print/2207/penyakit-tular-vektor-dan-reservoir-->
- Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). *Laporan Kinerja: Adaptasi di tengah pandemi, terus mengawal jaman yang berubah*.
- Elamin, M. Z., Ilmi, K. N., Tahriah, T., Zarnuzi, Y. A., Suci, Y. C., Rahmawati, D. R., ... Nafisa, I. F. (2018). Analysis of Waste Management in The Village of Disanah, District of Sresih Sampang, Madura. *JURNAL KESEHATAN LINGKUNGAN*, 10(4), 368. <https://doi.org/10.20473/jkl.v10i4.2018.368-375>
- Hendra, Y. (2016). Perbandingan Sistem Pengelolaan Sampah di Indonesia dan Korea Selatan: Kajian 5 Aspek Pengelolaan Sampah. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 7(1), 77–91. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v7i1.1281>
- Jambeck, J. R., Geyer, R., Wileox, C., Siegler, T. R., Perryman, M., Andrady, A., ... Law, K. L. (2015). Plastic waste inputs from land into the ocean. In *Science* (Vol. 347). American Association for the Advancement of Science. <https://doi.org/10.1126/science.1260879>

- Juniartini, N. L. P. (2020). Pengelolaan Sampah Dari Lingkup Terkecil dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai Bentuk Tindakan Peduli Lingkungan. *Jurnal Bali Membangun Bali*, 1(1), 27–40. <https://doi.org/10.51172/jbmb.v1i1.106>
- Katz, E., & Lazarsfeld, Paul. F. (2017). *Personal Influence: The Part Played by People in the Flow of Mass Communication*. New York: Routledge.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2024). Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN): Data timbunan sampah Kota Banjarmasin 2024. Retrieved September 15, 2025, from <https://sipsn.kemenvh.go.id/sipsn/>
- Lebreton, L., & Andrady, A. (2019). Future scenarios of global plastic waste generation and disposal. *Palgrave Communications*, 5(1), 6. <https://doi.org/10.1057/s41599-018-0212-7>
- Lingga, L. J., Yuana, M., Sari, N. A., Syahida, H. N., Sitorus, C., & Shahron, S. (2024). Sampah di Indonesia: Tantangan dan Solusi Menuju Perubahan Positif. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 12235–12247.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: SAGE Publications.
- Putri, R. D., Amelia, D., & Shabira, S. M. (2025). Pemanfaatan Media Sosial Untuk Mendorong Kesadaran Lingkungan. *Pemanfaatan Media Sosial (Putri, Dkk) Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(1), 21–26. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14597865>
- Rahayu, S., & Evanita, S. (2024). Strategi Komunikasi Lingkungan Penanggulangan Sampah Berkelanjutan melalui Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Riset Ilmiah Multidisipliner*, 8(5), 119–127.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*. (2008). Indonesia.
- Rogers, E. M., Singhal, A., & Quinlan, M. M. (2019). Diffusion of Innovations. Dalam *An Integrated Approach to Communication Theory and Research* (h. 415–434). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203710753-35>
- Triani, N., & Amberi, M. (2023). *Efektivitas Program Surung Sintak dalam Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Banjarmasin*. Banjarmasin.
- Wilson, D. C., Velis, C., & Cheeseman, C. (2006). Role of informal sector recycling in waste management in developing countries. *Habitat International*, 30(4), 797–808. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2005.09.005>
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.